



## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN (Studi Kasus di Desa Manubura Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka)

Yuliana A. Boleng Subah<sup>1</sup>, Nunsio Handrian Meylano<sup>2</sup>, Viktor Eko Transilvanus<sup>3</sup>

Universitas Nusa Nipa, Indonesia<sup>123</sup>

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Korespondensi Penulis : [yullsubah13@gmail.com](mailto:yullsubah13@gmail.com)

*Abstrack* : The background of this research has a strategic role in improving community competence through training and development programs. However, the effectiveness of program implementation was often hampered by budget constraints, infrastructure, and minimal follow-up. This research aimed to determine the role of the village government, the obstacles faced, and the impact of training on increasing community capacity.

The method used in this research was descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data sources used were primary and secondary data.

The results showed that the village government has made efforts to provide training facilities, conduct socialization, and implement various programs in following local potential, such as agri culture, entrepreneurship, and content creation. However, program implementation has not been optimal due to budget constraints (the village fund allocation was only around 30%), a lack of practical facilities, and the absence of continuous assistance and structured evaluation. These conditions have resulted in the impact of training tending to stop at increasing knowledge, which has not yet been fully implemented in the productive economic activities of the community.

**Keywords** : Village Government , Community Competence , Community Training and Development

**Abstrak**: Penelitian ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi masyarakat melalui program pelatihan dan pengembangan. Namun, efektivitas pelaksanaan program sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta minimnya tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran pemerintah desa, kendala yang dihadapi, serta dampak pelatihan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan fasilitas pelatihan, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan berbagai program sesuai potensi lokal, seperti pertanian, wirausaha, dan konten kreator. Namun, implementasi program belum optimal karena keterbatasan anggaran (Alokasi Dana Desa hanya sekitar 30%), minimnya sarana praktik, serta tidak adanya pendampingan berkelanjutan dan evaluasi terstruktur. Kondisi ini menyebabkan dampak pelatihan cenderung berhenti pada peningkatan pengetahuan, belum sepenuhnya terimplementasi dalam aktivitas ekonomi produktif masyarakat.



**Kata Kunci :** *Pemerintah Desa, Kompetensi Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat*

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara berkembang terus mendorong pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik, melainkan juga mencakup pembangunan sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Kompetensi dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang didasari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Menurut Andri Wahyu (2019), kompetensi memungkinkan individu bertindak profesional sesuai tuntutan pekerjaannya. Hal ini relevan dengan konteks pembangunan desa, di mana peningkatan kapasitas masyarakat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan partisipatif. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Desa Manubura di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk 1.152 jiwa dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan manusia, implementasi program kerja desa belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran (*Alokasi Dana Desa hanya sekitar 30%*), minimnya sarana praktik, serta belum adanya pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penghambat utama. Akibatnya, pelatihan yang dilaksanakan cenderung hanya meningkatkan

pengetahuan tanpa diikuti penerapan nyata dalam aktivitas ekonomi produktif masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi strategi penting untuk mentransfer keterampilan baik kepada masyarakat maupun aparatur desa melalui program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas program yang diterapkan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pelepasan tenaga kerja demi tercapainya tujuan organisasi. Priyono dan Marnis (2008) menekankan bahwa MSDM berperan dalam mengelola input dan output organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif.

Tujuan MSDM antara lain memberikan kontribusi terhadap efektivitas organisasi, mempertahankan kontribusi sesuai kebutuhan, merespons tantangan sosial secara etis, serta membantu karyawan mencapai tujuannya sehingga dapat meningkatkan kontribusi individual. Adapun manfaat MSDM meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan kinerja, optimalisasi sumber daya, peningkatan produktivitas, pengelolaan retensi, dan pengembangan budaya organisasi yang positif. Penggunaan bahan baku ramah lingkungan

#### **b. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah entitas masyarakat hukum yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suharyanto (2012) menyatakan bahwa pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun dan membimbing masyarakat selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Fungsi pemerintah desa tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, tetapi juga meliputi pengelolaan keuangan desa, menetapkan peraturan, membina perekonomian, serta membangun infrastruktur. Dalam konteks pemberdayaan, peran pemerintah desa mencakup fasilitasi masyarakat, memberikan arahan pembangunan, mendukung layanan sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan), serta membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas masyarakat (Nabilla, 2020).

### c. Kompetensi

Kompetensi merupakan integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan individu untuk melaksanakan tugas secara efektif. Menurut Andri Wahyu (2019), kompetensi adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan. Sementara itu, Nurul (2021) menambahkan bahwa kompetensi adalah kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara konsisten untuk mencapai prestasi kerja.

Manfaat kompetensi dalam pembangunan desa antara lain peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, peningkatan partisipasi pembangunan, pelayanan publik yang lebih efektif, tumbuhnya inovasi, serta pengurangan urbanisasi.

### d. Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi di tingkat desa umumnya dilakukan melalui:

1. **Sosialisasi** : Untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat program
2. **Pelatihan** : Guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan praktis.
3. **Penyediaan fasilitas**  
berupa sarana pendukung pembelajaran dan praktik.

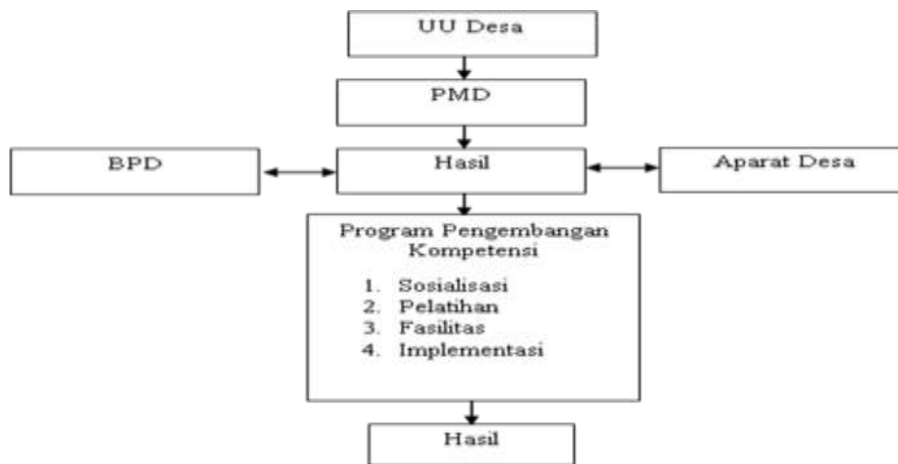
4. **Implementasi** : Penerapan hasil pelatihan dalam aktivitas ekonomi maupun sosial.

Namun, pengembangan kompetensi sering menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, kurangnya pelatihan berkelanjutan, terbatasnya anggaran, rendahnya motivasi kerja, akses terbatas terhadap informasi dan teknologi, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini didasarkan pada beberapa teori:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Menegaskan kewenangan desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)  
Didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berperan penting dalam pengawasan dan keterlibatan masyarakat.
- d. Aparat desa  
Dipandang sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki fungsi menjalankan kebijakan, mengelola kekuasaan, dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.



Gambar Kerangka Konsep

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan fakta lapangan secara mendalam mengenai peran pemerintah Desa Manubura dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara kontekstual melalui kata-kata, tindakan, serta interaksi yang dapat diamati.

### 1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan waktu penelitian selama dua minggu, yaitu pada 10–24 Juni 2025.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

*Data primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta observasi terhadap aktivitas dan kondisi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### b. Data Sekunder



*Data sekunder* adalah data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, dan literatur untuk mendukung hasil observasi dan wawancara di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman yang disusun untuk menggali informasi tentang peran pemerintah desa dan tantangan yang dihadapi.

#### b. Observasi

Mengamati secara langsung kondisi dan pelaksanaan program di lapangan

#### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan, arsip, dan kondisi lingkungan yang mendukung penelitian di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka.

### 4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas diuji melalui kredibilitas dan triangulasi (Aman, 2007).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Desa Manubura telah melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan kompetensi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyediaan fasilitas pendukung, serta implementasi, penyusunan dan pelaksanaan program juga mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 6 Tahun 2023

Tabel 4.3 Program Kerja di Desa Manubura

No	Program Kerja	Sasaran	Anggaran	Sumber Dana
----	---------------	---------	----------	-------------



1.	Sambungan Rumah Air bersih	Masyarakat	Rp. 9.370.000,00	Dana Desa
2.	Bantuan Rumah tidak layak huni	Masyarakat	Rp.10.000,000,00	Dana Desa
3.	Penanaman Jagung	Masyarakat	Rp.96.559.000,00	Dana Desa
4.	Pelatihan Digitalisasi Desa	Masyarakat	Rp .2.575.000,00	Dana Desa
5.	Pelatihan produk hokum desa	Masyarakat	Rp .2.455.000,00	Dana Desa
6.	Penanaman jagung silpa	Masyarakat	Rp.24.150.600,00	Dana Desa
7.	Pelatihan pembuatan minyak vco	Masyarakat	Rp.7.675.000,00	Dana Desa

Sumber Data : Progran Kerja Desa Manubura 2025

Berdasarkan pada tabel 4.3 secara umum, Pemerintah Desa Manubura telah melaksanakan berbagai program kerja yang didanai melalui Dana Desa, dengan mengedepankan tiga prioritas utama, yakni pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Tabel 4.4 Trigulasi Sumber

Tabel Trigulasi

No	Pertanyaan berdasarkan Variabel	Kepala Desa	Aparat Desa	Masyarakat	Kesimpulan
1	Bagaimana cara sosialisasi program pelatihan/kompetensi ?	Pendataan, musyawarah, melibatkan RT atau RW dan tokoh masyarakat, evaluasi rutin	Surat undangan, kumpul masyarakat (Informan 1)	Lewat balai desa, tempat ibadah, tokoh masyarakat (Informan 1) Lewat pertemuan dusun atau balai desa (Informan 2)	Sosialisasi sudah berjalan, tapi media terbatas & masih ada warga yang kurang menerima informasi secara lengkap





				Lewat pengumuman aparat desa (Informan 3)	
2	Strategi menumbuhkan kesadaran pentingnya kompetensi	Sosialisasi langsung, relevansi kebutuhan (pertanian, digital),	Belum ada pendekatan khusus (Informan 1)	Pelatihan sudah sesuai potensi desa (VCO, menjahit) (Informan 1) Butuh pelatihan lebih variatif (pertanian modern, teknologi) (Informan 2) Disesuaikan kelompok sasaran (pemuda, ibu rumah tangga) (Informan 3)	Perlu strategi lebih partisipatif & menyesuaikan kebutuhan nyata masyarakat
3	Hambatan sosialisasi	Kehadiran warga terlambat,	Tidak ada metode khusus,	Antusiasme baik jika relevan, tapi	Hambatan utama: partisipasi



		ijin pulang, mendadak	hambatan ada (Informan 1)	kadang warga sibuk (Informan 1) Ada yang ragu ikut karena tidak tahu manfaat (Informan 2) Waktu tidak sesuai, informasi kurang detail (Informan 3)	rendah, waktu, dan penyampaian informasi
4	Jenis pelatihan	Sekolah lapang, konten kreator, pertanian, hortikultura, wirausaha	Belum ada kriteria seleksi khusus (Informan 1)	Pelatihan menjahit, VCO relevan (Informan 1) Perlu lebih bervariasi & modern (Informan 2) Disesuaikan kelompok sasaran (Informan 3)	Pelatihan ada, relevan, tapi variasi terbatas
5	Evaluasi pelatihan	Sederhana, lihat penerapan di lapangan	Belum ada evaluasi (Informan 1)	Ada manfaat misalnya minyak kelapa,	Evaluasi belum sistematis, dampak ada tapi belum menyeluruh



				<p>pertanian lebih baik (Informan 1) Ada perubahan, tapi minim pendampingan (Informan 2) Pemuda mulai aktif digitalisasi (Informan 3)</p>	
6	Fasilitas	Internet ( <i>skerling</i> ), aula, kursi, meja, laptop, kerjasama lintas instansi	Belum memadai, terbatas, belum ada kerjasama formal (Informan 1)	<p>Fasilitas ada, tapi kurang alat bantu (Informan 1) Fasilitas ada, tapi kurang alat bantu (Informan 2) Tempat lumayan, tapi minim proyektor &amp; alat praktik (Informan 3)</p>	Fasilitas dasar ada, tapi tidak cukup untuk pelatihan maksimal



7	Implementasi program dan keberlanjutan	Lihat pola hidup dan partisipasi masyarakat	Belum ada evaluasi formal, rencana ada monitoring (Informan 1)	Ada manfaat, tapi perlu tindak lanjut dan monitoring (Informan 1) Pemuda aktif setelah pelatihan digitalisasi (Informan 2) Ada hasil nyata ( <i>ibu-ibu produksi VCO, petani praktik baru</i> ) (Informan 3)	Program bermanfaat, tapi perlu keberlanjutan dan pendampingan
---	--	---	--	--	---

Sumber Data : Data primer wawancara dari Informan

## 2. Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program yang dilaksanakan

### a. Sosialisasi Program Pengembangan Kompetensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Manubura telah berperan aktif dalam sosialisasi program peningkatan kompetensi masyarakat melalui pendataan sosial, ekonomi, dan pendidikan serta penyesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan lokal seperti pertanian, usaha kecil, dan keterampilan digital. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya motivasi dan



kedisiplinan masyarakat serta metode komunikasi yang konvensional. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga harus menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu membangun kesadaran, meningkatkan partisipasi, dan mendorong keberhasilan program pelatihan secara berkelanjutan

#### **b. Pelaksanaan Pelatihan**

Pemerintah Desa Manubura telah melaksanakan berbagai program pelatihan berbasis potensi lokal, seperti sekolah lapang, pertanian, wirausaha, hortikultura, dan konten kreator, yang mengintegrasikan teori dan praktik sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, efektivitas pelatihan masih terbatas akibat seleksi peserta berbasis kuota tanpa memperhatikan minat dan kompetensi, lemahnya motivasi serta sosialisasi, dan ketiadaan evaluasi berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *training gap* karena hasil tidak sejalan dengan tujuan. Dengan demikian, peran pemerintah desa perlu diperkuat melalui manajemen pelatihan yang komprehensif agar pelatihan tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar meningkatkan kapasitas individu, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

#### **c. Penyediaan Fasilitas Pelatihan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Manubura telah berperan aktif dalam penyediaan fasilitas pelatihan, antara lain aula pertemuan, jaringan internet (W-Fi), laptop, dan *sound system* untuk mendukung berbagai kegiatan pelatihan, seperti pertanian, kewirausahaan, dan pembuatan konten digital. Fasilitas tersebut berfungsi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembelajaran.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pelatihan masih menghadapi keterbatasan. Sarana praktik yang tersedia belum memadai sehingga peserta harus bergiliran dalam penggunaannya. Kondisi ini mengakibatkan waktu belajar berkurang dan kualitas keterampilan praktis yang diperoleh tidak optimal. Selain

itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pelatihan hanya sekitar 30% dari total Dana Desa, karena sebagian besar anggaran telah terikat oleh regulasi pemerintah pusat. Keterbatasan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas hasil pelatihan dan terbatasnya peluang masyarakat untuk memperoleh pengalaman belajar yang maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penyediaan fasilitas pelatihan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan, dan dilengkapi dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Langkah ini penting agar peran pemerintah desa tidak hanya sebatas penyedia sarana, tetapi juga mampu secara efektif meningkatkan kompetensi masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

#### **d. Implementasi dan Dampak Program**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan di Desa Manubura belum optimal. Meskipun pelatihan telah berjalan dan memberi manfaat awal, tidak terdapat tindak lanjut berupa pendampingan atau pembentukan kelompok usaha produktif. Akibatnya, keterampilan peserta tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam konteks ekonomi lokal dan hanya berhenti pada tahap transfer pengetahuan.

Kendala utama meliputi keterbatasan Dana Desa hanya sekitar 30% dialokasikan untuk pelatihan keberlanjutan dan evaluasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi, di mana pelatihan lebih berorientasi pada pelaksanaan prosedural dibandingkan pencapaian hasil nyata.

Dengan demikian, implementasi program pelatihan di Desa Manubura perlu diperkuat melalui strategi kebijakan yang lebih terintegrasi, mencakup pendampingan pascapelatihan, mekanisme evaluasi berkelanjutan, serta optimalisasi alokasi Dana Desa. Pendekatan ini penting agar pelatihan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **1. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Manubura memiliki peran strategis dalam peningkatan kompetensi masyarakat melalui empat aspek utama, yaitu sosialisasi program, pelaksanaan pelatihan, penyediaan fasilitas, serta implementasi hasil pelatihan. Sosialisasi telah dilakukan secara partisipatif dan menyesuaikan potensi lokal, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya motivasi, kedisiplinan, dan metode komunikasi yang konvensional. Pelatihan telah berjalan sesuai kebutuhan lokal, tetapi kelemahan terdapat pada seleksi peserta, sosialisasi tujuan, serta ketiadaan evaluasi berkelanjutan. Penyediaan fasilitas fisik seperti aula, WiFi, dan laptop telah mendukung proses pembelajaran, namun keterbatasan sarana praktik dan minimnya alokasi anggaran ( $\pm 30\%$  Dana Desa) membatasi kualitas hasil pelatihan. Implementasi program juga belum menghasilkan dampak signifikan karena tidak adanya pendampingan, kelompok usaha, dan mekanisme evaluasi, sehingga hasil pelatihan berhenti pada transfer pengetahuan semata.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, yaitu:

- a. Sosialisasi program perlu memanfaatkan media digital (WhatsApp group, media sosial, aplikasi desa), mengadopsi metode komunikasi partisipatif seperti focus group discussion (FGD) atau coaching clinic, serta memberikan insentif partisipasi agar motivasi dan kedisiplinan warga meningkat.
- b. Pelaksanaan pelatihan sebaiknya menggunakan mekanisme seleksi berbasis minat dan motivasi (*person-job fit*), memperkuat tahap pre-training dengan penjelasan manfaat kegiatan, serta menerapkan evaluasi berkelanjutan dengan model Kirkpatrick untuk mengukur efektivitas.
- c. Penyediaan fasilitas pelatihan perlu ditingkatkan melalui peninjauan kembali alokasi Dana Desa, kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, atau dinas terkait, serta penerapan mekanisme pemeliharaan sarana agar dapat dimanfaatkan jangka panjang.



- d. Implementasi dan keberlanjutan program perlu diperkuat melalui pendampingan pascapelatihan, pembentukan kelompok usaha produktif, evaluasi rutin, serta strategi jangka panjang berbasis *human capital development*. Selain itu, optimalisasi Dana Desa dengan alokasi khusus untuk program nonfisik, seperti pelatihan, pendampingan, dan inkubasi usaha, agar pelatihan benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

### Daftar Referensi

- Aman. (2007). *Analisis Isi: Metode dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri, W. (2019). *Kompetensi dan Profesionalisme Kerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nabilla, D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.
- Nurul, A. (2021). *Kompetensi dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono, & Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto. (2012). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 112–125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.